

PEMERINTAH KABUPATEN  
BANGKA BARAT



# RILPPD

# 20 25



RINGKASAN  
LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT  
TAHUN 2025



# RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RILPPD)

## I. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dasar pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

**Tabel I.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 dan 2025**

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAAN KINERJA TAHUN 2024	CAPAIAAN KINERJA TAHUN 2025	PERUBAHAN (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,36	72,23	1,22
2	Angka Kemiskinan	2,59	2,92	12,74
3	Angka Pengangguran	4,88	4,49	-7,99
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,47	1,71	-68,56
5	Pendapatan Per Kapita	91.207.870.000,00	97.858.360.000	7,26
6	Ketimpangan Pendapatan	0,201	0,178	-11,44

Adapun untuk penjelasan secara rinci terkait dengan capaian indicator makro di atas adalah sebagai berikut :

### 1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

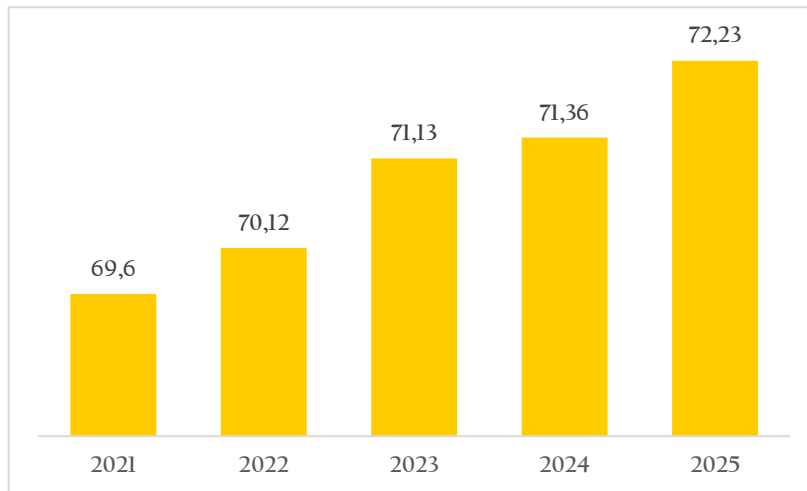
IPM merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta standar hidup yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu indeks komposit yang membentuk IPM.

Nilai IPM Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2025 sebesar 72,23 dan jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2024 yaitu sebesar 71,36 mengalami peningkatan sebesar 1,22 %. Jika dilihat dari segi perkembangan antar waktu selama 5 tahun terakhir bahwa capaian IPM Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2025 merupakan capaian tertinggi dan untuk

capaian terendah selama kurun waktu 5 tahun terakhir adalah pada tahun 2021 sebesar 69,60.

Jika dilihat dari grafik di bawah ini bahwa capaian IPM Kabupaten Bangka Barat setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang positif yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi di Kabupaten Bangka Barat.

**Grafik I.1**  
**Perkembangan IPM Kabupaten Bangka Barat Kurun Waktu 2021-2025**



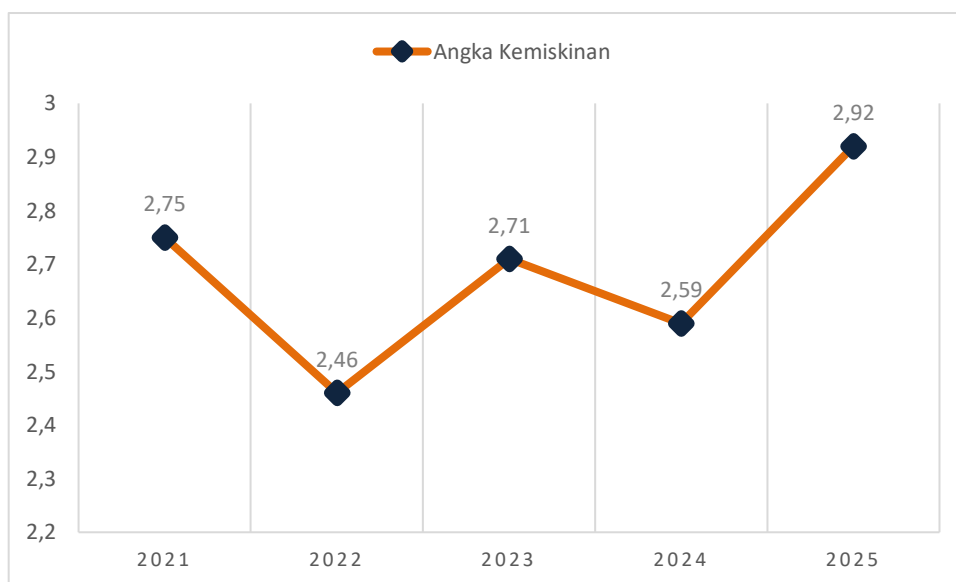
*Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka Tahun 2026*

### 1.2. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian serius dari pemerintah. Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat, merupakan pihak-pihak memiliki tanggungjawab yang sama terhadap penanggulangan kemiskinan.

Angka Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2025 sebesar 2,92 dan jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2024 yaitu sebesar 2,59 mengalami peningkatan sebesar 12,74%. Jika dilihat dari segi perkembangan antar waktu selama 5 tahun terakhir bahwa capaian Angka Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat cenderung fluktuatif di mana untuk capaian angka kemiskinan terendah berada pada tahun 2022 yaitu sebesar 2,46 sedangkan untuk capaian tertinggi terjadi pada tahun 2025 sebesar 2,92.

**Grafik I.2**  
**Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat**  
**Kurun Waktu 2021-2025**



*Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka Tahun 2026*

Jika di lihat dari grafik di atas bahwa capaian angka kemiskinan Kabupaten Bangka Barat fluktuatif di mana jika di lihat dari segi trend cenderung mengalami penurunan. Capaian angka Kemiskinan di tahun 2021 hingga tahun 2023 cenderung meningkat dan kemudian di tahun 2024 mengalami penurunan dan Kembali mengalami peningkatan di tahun 2025.

### 1.3. Angka Pengangguran

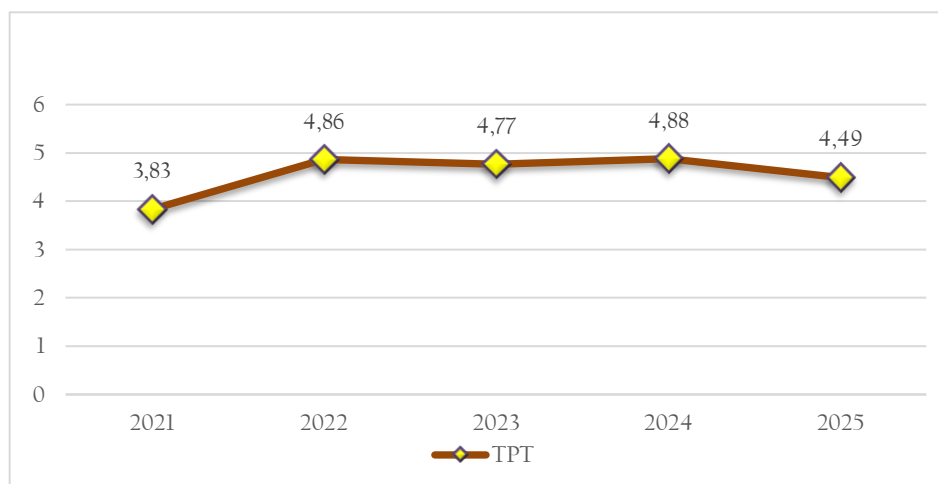
Angka pengangguran dilihat dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Sementara pengangguran adalah mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Semakin rendah tingkat pengangguran, maka dapat dikatakan tingkat ekonomi disuatu daerah semakin baik/maju, sekaligus merupakan tanda keberhasilan pemerintah dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan.

TPT Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2025 sebesar 4,49 dan jika dibandingkan dengan capaian di Tahun 2024 sebesar 4,77 mengalami penurunan sebesar -7,99%. Jika dilihat dari segi perkembangan antar waktu selama 5 tahun terakhir bahwa capaian TPT Kabupaten Bangka Barat cenderung fluktuatif di mana untuk capaian TPT terendah berada pada tahun 2021 yaitu sebesar 3,83 sedangkan untuk capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 4,88.

**Grafik I.3**

**Perkembangan TPT Kabupaten Bangka Barat Kurun Waktu 2021-2025**



Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka Tahun 2026

**1.4. Pertumbuhan Ekonomi**

Untuk mengukur capaian pembangunan khususnya dibidang ekonomi, salah satu indikator yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Angka pertumbuhan ekonomi diperoleh dari data pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB ADHK (rill) menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

**Tabel I.2**  
**Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Bangka Barat**  
**Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025 (persentase)**

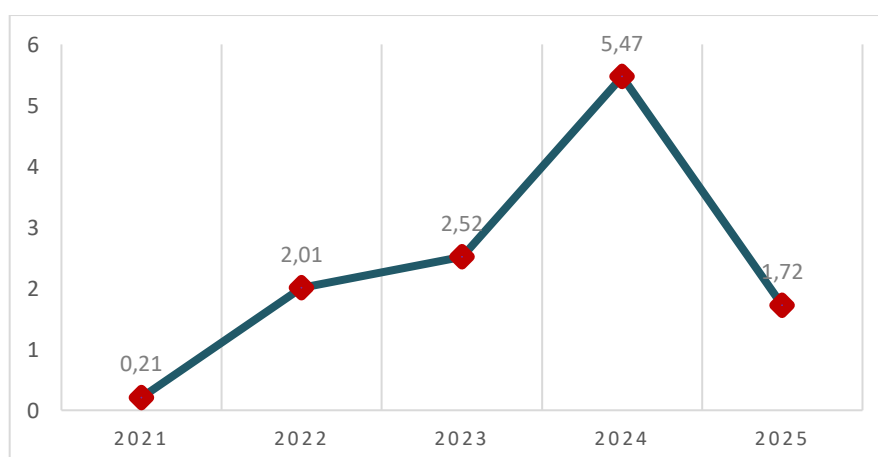
KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,01	4,13	4,63	3,48	2,11
B	Pertambangan dan Penggalian	10,11	1,82	-2,89	-2,67	8,58
C	Industri Pengolahan	-4,46	-1,03	0,27	11,99	-0,84
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,54	-3,58	4,42	3,31	4,94
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,97	3,31	0,79	3,24	3,47
F	Konstruksi	1,71	1,87	7,26	-1,67	-1,28
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,81	9,20	5,67	-3,72	4,76
H	Transportasi dan Pergudangan	8,29	11,42	8,90	3,57	8,30

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2021	2022	2023	2024	2025
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,29	9,94	12,69	2,97	8,46
J	Informasi dan Komunikasi	5,92	8,48	12,86	7,80	5,71
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,36	8,60	11,84	1,58	-1,47
L	Real Estate	4,29	8,19	6,94	3,01	4,55
M,N	Jasa Perusahaan	4,09	8,31	5,64	3,92	6,74
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,64	-0,93	7,14	6,54	-1,21
P	Jasa Pendidikan	1,86	3,04	4,87	9,69	6,89
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,24	2,66	4,98	-0,85	8,35
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,20	7,50	9,44	7,84	8,01
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>0,20</b>	<b>2,00</b>	<b>2,52</b>	<b>5,47</b>	<b>1,72</b>

Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka Tahun 2026

Pada tahun 2025, dari 17 kategori lapangan usaha pembentuk PDRB, terdapat 4 kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif, sementara 3 kategori lapangan usaha mengalami penurunan atau pertumbuhan yang negatif dan 10 kategori lapangan usaha mengalami peningkatan. Tiga kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah penggalan, transportasi pergudangan, dan sosial. Sementara lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif tertinggi adalah pada konstruksi, jasa keuangan dan social wajib.

**Grafik I.4**  
**Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat**  
**Kurun Waktu 2021-2025**



Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka Tahun 2026

Berdasarkan publikasi BPS, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2025 mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2025

sebesar 1,72% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu yaitu sebesar 5,47% atau sebesar -68.56 %.

Jika dilihat dari segi perkembangan antar waktu selama 5 tahun terakhir bahwa capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat cenderung fluktuatif di mana untuk capaian Pertumbuhan Ekonomi terendah berada pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,21 sedangkan untuk capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 5,47.

### 1.5. Pendapatan Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator makro sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan dan kemakmuran penduduk di suatu wilayah yang dibandingkan dengan wilayah lain. PDRB per kapita diperoleh dengan membagi PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Berdasarkan publikasi BPS Kabupaten Bangka Barat, untuk nilai PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp 97.858.360.000,00 Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 dengan nilai PDRB per kapita sebesar Rp 91.214.380.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar 7,28% di Tahun 2025. Selama 5 (lima) tahun terakhir, nilai PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat menunjukkan perkembangan yang positif.

**Grafik I.5**

**Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Bangka Barat Kurun Waktu 2021-2025**



Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka Tahun 2026

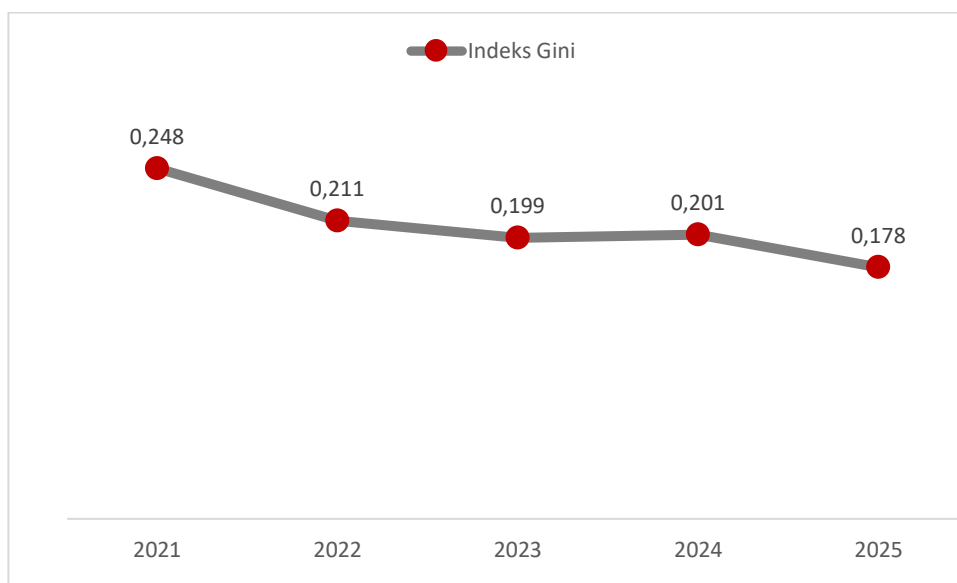
### 1.6. Ketimpangan Pendapatan

Dalam pengukuran statistik, dikenal pula Indeks Gini atau *Gini Ratio* yang merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan

secara menyeluruh. Dalam mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia, BPS menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan. Berdasarkan konsep BPS, *Gini ratio* adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran yang menggunakan nilai yang berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai *gini ratio* yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Indeks Gini Kabupaten Bangka Barat selama 5 (lima) tahun terakhir secara trend menunjukkan penurunan. Pada Tahun 2024 Indeks Gini Kabupaten Bangka Barat sebesar 0,178 menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar 0,201. Capaian Indeks Gini Kabupaten Bangka Barat terendah terjadi di tahun 2023 yang jika dibandingkan selama tahun 2020 hingga 2024.

**Grafik I.6**  
**Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Bangka Barat Kurun Waktu 2021-2025**



*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025*

## 2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/ informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

### 2.1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

#### a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2025**

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Capaian Kinerja
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Pendidikan Usia Dini	100 %
2	Pendidikan Dasar	99,71 %
3	Pendidikan Kesetaraan	98,74 %

**b. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan**

Realisasi belanja urusan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Realisasi Anggaran Urusan Pendidikan Tahun 2025**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI
<b>I</b>	<b>PENDIDIKAN</b>				<b>57.329.213.130</b>	<b>51.825.468.544</b>
1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>		Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini	<b>4.037.071.440</b>	<b>3.558.663.262</b>
			Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah		39.718.000	39.718.000
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		2.599.200.000	2.219.165.250
			Pembangunan Ruang Kelas Baru		561.796.630	561.796.630
			Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah		135.000.000	86.103.900
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD		407.895.000	396.989.119
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		293.461.810	254.890.363
		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>		Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar	<b>9.317.962.970</b>	<b>7.668.425.475</b>
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/Kesetaraan		160.000.000	141.000.000
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		315.000.000	293.022.475
			Pembangunan Ruang Kelas Baru		234.713.000	234.713.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		1.008.313.000	1.002.513

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		7.464.400.000	5.918.170.000
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		29.600.000	29.600.000
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		20.000.000	13.775.000
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		85.936.970	35.632.000
		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>			<b>4.491.750.000</b>	<b>3.669.060.860</b>
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		300.000.000	298.272.250
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		200.000.000	151.000.000
			Pembangunan Ruang Kelas Baru		600.000.000	492.449.350
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		140.000.000	138.601.260
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		234.250.000	227.963.000
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		2.907.600.000	2.285.025.000
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		1.600.000	1.600.000
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		10.000.000	3.550.000
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		98.300.000	70.600.000
		<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan</b>		Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan	<b>37.150.000</b>	<b>37.150.000</b>
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		37.150.000	37.150.000
		<b>KEGIATAN LAINNYA</b>			<b>39.445.278.720</b>	<b>36.892.168.947</b>
			Pengelolaan dana BOS SD		23.496.080.000	21.620.849.775
			Pengelolaan dana BOS SMP		10.094.000.000	9.487.458.502
			Pengelolaan dana BOP PAUD		3.937.480.000	3.910.131.750
			Pengelolaan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan/Non formal		995.160.000	964.420.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI
			Pengadaan mebel PAUD		95.820.000	95.820.000
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		178.142.090	178.142.090
			Pembangunan Ruang Kelas Baru		61.796.630.000	561.796.630.000
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan		76.500.000	64.335.200
			Penyelenggaraan proses belajar mengajar bagi peserta didik		10.300.000	9.125.000

### c. Permasalahan yang dihadapi

Dalam pelaksanaan kinerja di bidang Pendidikan tentunya memiliki beberapa permasalahan yang di hadapi oleh Dinas teknis. Adapun untuk permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- Belum sinkronnya serta belum dilakukan update data kependudukan dengan data di dalam DAPODIK, sehingga berdampak pada tidak validnya data jumlah siswa sekolah pada jenjang pendidikan tertentu;
- Belum adanya harmonisasi data antara kementerian pendidikan dengan kementerian agama untuk siswa yang bersekolah di satuan pendidikan di kewenangan masing-masing lembaga;
- Belum optimalnya upaya daerah didalam meningkatkan angka kesetaraan serta arah kebijakan melalui program kegiatan lintas sector dalam upaya intervensi Anak Tidak Sekolah/ Anak Putus Sekolah .
- Belum adanya keselarasan kebijakan Kementerian untuk penggunaan data di dalam penetapan target sasaran serta realisasi kinerja mutu layanan yang berdampak kepada capaian kinerja daerah

## 2.2. BIDANG URUSAN KESEHATAN

### a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2025**

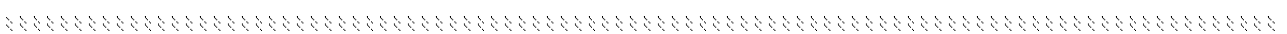
No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Capaian Kinerja
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	97,98%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	99,72%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100%

**b. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan**

Realisasi belanja urusan kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4  
Realisasi Anggaran Urusan Kesehatan Tahun 2025**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI
<b>II</b>	<b>KESEHATAN</b>				<b>31.071.858.483</b>	<b>28.628.708.171</b>
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.657.364.900	1.491.466.948
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	a. pelayanan kesehatan ibu hamil	477.108.000	475.878.694
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	b. pelayanan kesehatan ibu bersalin	64.098.000	54.967.270
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir	4.744.3000	4.744.3000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	d. pelayanan kesehatan balita	1.783.500	1.783.500
			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	506.28.100	496.723.080
			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	f. pelayanan kesehatan pada usia produktif	15.989.000	15.938.000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut	74.420.000	70.945.974
			Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi	9.619.000	9.568.000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	6.504.000	6.278.000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan	j. pelayanan kesehatan orang dengan	127.774.000	89.667.000



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI
			Gangguan Jiwa Berat	gangguan jiwa (ODGJ) berat		
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	360.125.000	259.891.200
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	8.920.000	5.082.000
			KEGIATAN LAINNYA		29.414.493.583	27.137.241.223
			Alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan		21.144.509.400	19.737.932.118
			Pengadaan Obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan		8.086.546.783	7.220.187.705
			Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan		183.437.400	179.121.400

### c. Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan bidang kesehatan, baik permasalahan eksternal maupun internal antara lain yaitu:

- Peran aktif desa dalam penganggaran kesehatan untuk pelaksanaan kegiatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) serta komitmen perangkat desa dalam membantu pelaksanaan kegiatan kesehatan di Desa, masih ada beberapa desa yang belum maksimal;
- Rendahnya status ekonomi juga menyebabkan masyarakat tidak bisa memeriksakan kesehatannya/masih ada masyarakat tidak mampu yang tidak mempunyai jaminan pelayanan kesehatan;

- Masih ada penerima pelayanan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan luar wilayah kerja Kabupaten ataupun Kecamatan.

## 2.3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

### a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum yang diperoleh Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut

**Tabel 2.5**  
**Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025**

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Capaian Kinerja
1	2	3
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan air Limbah Domestik	100%

### b. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum

Realisasi belanja urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Realisasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI
III	PEKERJAAN UMUM				14.711.855.515	13.543.150.693
					11.066.962.000	10.593.232.128
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	27.500.000	12.856.000
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		27.500.000	12.856.000
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		45.000.000	3.995.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		4.099.125.000	4.031.462.801
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		20.000.000	12.244.000
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		314.382.000	141.821.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	3.644.893.515	2.949.918.565
			Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat		300.000.000	298.470.000
			Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja		300.000.000	2.840.000
			Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja		380.811.100	273.593.550
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		300.000.000	294.664.000
			Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat		354.332.202	173.697.802
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		1.486.083.000	1.446.738.00

### c. Permasalahan yang dihadapi

Dalam pelaksanaan kinerja di bidang Pekerjaan Umum tentunya memiliki beberapa permasalahan yang di hadapi oleh Dinas teknis. Adapun untuk permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- Kapasitas Fiskal: Adanya keterbatasan anggaran daerah yang menyebabkan beberapa target capaian dan pemenuhan mutu SPM tidak dapat terpenuhi secara maksimal;

- Kualitas Sumber Daya: Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM teknis di lapangan yang berisiko pada pelaksanaan program yang tidak sepenuhnya memenuhi standar teknis yang ditetapkan;
- Kondisi Infrastruktur: Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang yang sudah terbangun, sehingga mengancam keberlanjutan layanan jangka panjang bagi masyarakat.

## 2.4. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

### a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat yang diperoleh Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
**Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025**

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Capaian Kinerja
1	2	3
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%

### b. Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat

Realisasi belanja urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.8**  
**Realisasi Anggaran Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI
IV	PERUMAHAN RAKYAT				687,509,000	420,652,450
					165,000,000	8,904,250
	PROGRAM PENGEMBAN GAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kot	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak huni bagi Korban Bencana	0	0
			Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan		40,000,000	1,599,250
			Pengumpulan data rumah korban bencana		10,000,000	4,980,000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI
			kejadian sebelumnya yang belum tertangani			
			Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana Bagian Bawah Formulir		0	0
			Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota		0	0
			Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus		0	0
			Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		50,000,000	0
			Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		7,500,000	862,5
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		50,000,000	0
			Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		7,500,000	1,462,500
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023348</b>	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana		343,750,000	307,106,500
			Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota		0	0
			Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana		0	0
			Pembangunan rumah bagi korban bencana		178,759,000	104,641,700
			Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota		0	0
			Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan		0	0

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI
			pada relokasi program Kabupaten/Kota			
			Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		0	0
			Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota		0	0
			Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota		0	0
			Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		0	0
			Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		0	0
			Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		0	0

**c. Permasalahan yang dihadapi**

Dalam pelaksanaan kinerja di bidang Perumahan Rakyat tentunya memiliki beberapa permasalahan yang di hadapi oleh Dinas teknis. Adapun untuk permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- Perlu adanya sinkronisasi data hasil identifikasi lokasi rawan bencana yang telah dilakukan oleh dinas perumahan kawasan permukiman dan perhubungan terkait dengan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana dengan dokumen kebencanaan yang telah tersedia;
- Perlunya dilakukan sosialisasi kepada beberapa *stakeholder* terkait dengan kebijakan upaya relokasi perumahan yang terdampak program pemerintah Kabupaten/ Kota di masyarakat;
- Perlu adanya sinergisitas serta komitmen bersama didalam upaya pelaksanaan relokasi meliputi, penyusunan perencanaan, dan penganggaran daerah agar dapat lebih optimal

## 2.5. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

### a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diperoleh Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.9**  
**Capaian Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025**

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Capaian Kinerja
1	2	3
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	100%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandang dan Pengemis di Luar Panti	100%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%

### b. Realisasi Belanja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Realisasi belanja urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.10**  
**Realisasi Anggaran Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI
IV	TRANTIBUM				6,323,545,000	5,561,382,615
					165,000,000	8,904,250
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota		6,050,000	0

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI
			Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia		3,634,770,000	3,313,055,000
			Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		77,745,000	71,305,000
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		176,060,000	175,466,300
			Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		67,235,000	67,166,600
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		27,275,000	26,525,000
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah		16,045,000	10,095,000
			Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		6,885,000	617
	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)		42,885,000	42,885,000
		<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota		100,000,000	99,622,500
			Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota		916,590,000	820,945,030
			Penyusunan rencana kontijensi		100,000,000	99,622,500
			Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana		50,250,000	50,212,000
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota		62,900,000	62,626,500

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		36,815,000	36,810,000
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		9,260,000	9,260,000
		<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas		285	0
			Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota		150	0
			Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota		99,425,000	96,017,000
			Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota		71,350,000	64,203,750
			Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana		50	0
		<b>Penataan Sistem Dsar Penanggulangan an Bencana</b>	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota		50	0
			Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota		50	0
			Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota		50	0
			Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		50	0
			Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana		50	0
			Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		50	0
	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (DAMKAR)</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota		50,080,000	49,160,000
			Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota		62,500,000	33,151,200
			Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran		627,840,000	368,360,000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI
			Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota		300	0
			Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri		35,000,000	26,026,200
			Pembinaan aparatur pemadam kebakaran		30,000,000	27,341,035
		<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran		200	200
		<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat		15,300,000	10,710,000

### c. Permasalahan yang dihadapi

Dalam pelaksanaan kinerja di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum tentunya memiliki beberapa permasalahan yang di hadapi oleh Dinas teknis. Adapun untuk permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- Masih ada kegiatan yang belum diakomodir untuk mencapai target Standar Pelayanan Minimal dikarenakan keterbatasan anggaran;
- Masih terbatasnya sarana prasarana dan personil baik dari segi kuantitas maupun kapasitas untuk mendukung pencapaian SPM di mana jika merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di setiap kecamatan harus ada personil Polisi Pamong Praja serta harus ada UPT Kebakaran di setiap kecamatan

## 2.6. BIDANG URUSAN SOSIAL

### a. Capaian Kinerja Outcome

Dalam pelaksanaan kinerja di bidang Sosial tentunya memiliki beberapa permasalahan yang di hadapi oleh Dinas teknis. Adapun untuk permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.11**  
**Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2025**

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Capaian Kinerja
1	2	3
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%
5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100%

**b. Realisasi Belanja Urusan Sosial**

Realisasi belanja urusan Sosial Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.12**  
**Realisasi Anggaran Urusan Sosial Tahun 2025**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI
<b>VI</b>	<b>SOSIAL</b>				<b>613.586.124</b>	<b>515.702.060</b>
6	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	520.151.374	474.818.110
			Penyediaan permakanan		115.500.000	115.500.000
			Penyediaan sandang	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	157.387.000	133.499.546
			Penyediaan alat bantu		25.900.000	8.520.121
			Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	23.917.580	23.562.530
			Pemberian bimbingan fisik,		6.060.000	6.060.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI
			mental, spiritual, dan sosial			
			Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	19.695.000	19.291.000
			Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		22.564.998	22.282.619
			Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		12.400.000	11.171.160
			Pemberian layanan data dan pengaduan		3.234.998	3.234.998
			Pemberian layanan kedaruratan		34.674.998	34.335.498
			Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		18.447.000	18.166.400
			Pemberian layanan rujukan		80.369.800	79.184.240
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	93.434.750	40.893.950
			Penyediaan makanan		44.367.250	15.726.750
			Penyediaan sandang		28.272.500	5.772.200
			Penyediaan tempat penampungan pengungsi		1.000.000	-
			Penanganan khusus bagi kelompok rentan		10.835.000	10.810.000
			Pelayanan dukungan Psikososial		8.960.000	8.585.000

**c. Permasalahan yang dihadapi**

Dalam pelaksanaan kinerja di bidang Sosial tentunya memiliki beberapa permasalahan yang di hadapi oleh Dinas teknis. Adapun untuk permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- Belum optimalnya kinerja pekerja sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikarenakan banyaknya tugas tambahan yang dibebankan kepada mereka di luar tugas fungsi pokoknya;
- Masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelayanan sosial terutama terkait ketersediaan rumah singgah dan sarana mobilitas kegiatan yang memadai.

## 2. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) dan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024

### 3.1. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2024

Adapun untuk hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah Daerah Tahun 2025 sampai dengan saat ini belum dikeluarkan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jendral otonomi Daerah sehingga untuk hasil evaluasi terakhir masih menggunakan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 yang lalu. Berdasarkan hasil Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023, Kabupaten Bangka Barat berada di *posisi 81* dari 395 Kabupaten yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperoleh *skor nilai sebesar 3,2863* dengan status *kinerja sedang*.

### 3.2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024

Berdasarkan Laporan Nomor dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 102.B/LHP/XVIII.PPG/07/2025 tentang Hasil Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024, Kabupaten Bangka Barat mendapatkan opini *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024, yang berarti laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah menyajikan data secara wajar baik dalam hal material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

## 3. Ringkasan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menyelenggarakan urusan desentralisasi yaitu 32 urusan Pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan desentralisasi yang dilaksanakan pada tahun 2024 terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan total belanja sebesar Rp. 1.075.316.949.848,18 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 788.811.551.677,17, Belanja Modal sebesar Rp. 157.224.444.574,20 Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 5.457.426.216,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 123.823.527.380,81 dengan total realiasi belanja sebesar Rp. 964.292.843.963,77 atau 88,47%, yang terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 698.710.268.083,21(88,57%), realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 146.546.488.440,65 (93,20%) realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 0,00 (0%) dan realisasi Belanja Transfer sebesar Rp. 119.036.087.439,91 (96,13%).

Sedangkan untuk pendapatan daerah, pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki anggaran pendapatan daerah sebesar Rp 1.061.524.502.346,27 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan anggaran sebesar Rp 136.077.953.513,18 Pendapatan Transfer dengan anggaran sebesar Rp 925.446.548.833,09 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan total anggaran sebesar Rp 9.501.870.844,02 Sedangkan total realisasi pendapatan daerah pada tahun 2025 ini sebesar Rp. 817.151.677.323,58 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi sebesar Rp 106.349.131.616,58 atau sebesar 76,98%, Pendapatan Transfer dengan realisasi sebesar Rp 854.477.489.064 atau 92,33% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan realisasi sebesar Rp 10.089.481.141,57 atau sebesar 105,66%.

**Tabel 4.1**  
**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2025**

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.061.524.502.346,27</b>	<b>817.151.677.323,58</b>	<b>76,98</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>136.077.953.513,18</b>	<b>106.349.131.616,58</b>	<b>78,15</b>
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	67.942.315.269,16	49.846.308.335,00	73,37
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	48.633.767.400,00	41.669.713.083,70	85,68
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.000.000.000,00	4.793.629.056,31	47,94
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.501.870.844,02	10.039.481.141,57	105,66
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>925.446.548.833,09</b>	<b>854.477.489.064</b>	<b>92,33</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	865.490.458.639,00	808.834.416.418	93,45
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	59.956.090.194,09	45.643.072.646	76,13
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.075.316.949.848,18</b>	<b>964.292.843.963,77</b>	<b>88,47</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>788.811.551.677,17</b>	<b>698.710.268.083,21</b>	<b>88,57</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	436.357.457.364,25	404.866.966.303,50	92,78
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.982.063.667,92	270.701.028.170,71	83,04
5.1.05	Belanja Hibah	20.460.947.645,00	18.914.279.644,00	92,44
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.011.083.000,00	4.227.993.965,00	70,33
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>157.224.444.574,20</b>	<b>146.546.488.440,65</b>	<b>93,20</b>
5.2.01	Belanja Tanah	296.646.000,00	296.646.000,00	100,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.806.377.174,20	35.045.681.415,00	92,69
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	69.600.676.572,00	66.277.318.233,00	95,22

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44.233.847.178,00	39.659.633.302,65	89,65
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.286.897.650,00	5.267.209.490,00	99,62
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	5.457.426.216,00	-	<b>0,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.457.426.216,00	-	0,00
2.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>123.823.527.380,81</b>	<b>119.036.087.439,91</b>	<b>96,13</b>
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	5.452.374.516,00	5.452.374.516,91	100,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	118.371.152.863,90	113.583.712.923,00	95,95
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>( 13.792.447.501,91 )</b>	<b>23.638.758.470,43</b>	<b>(171,38)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>13.792.447.501,91</b>	<b>13.692.447.501,91</b>	<b>99,27</b>
<b>6,1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>13.792.447.501,91</b>	<b>13.692.447.501,91</b>	<b>99,27</b>
6,1,01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	13.692.447.501,91	13.692.447.501,91	100,00
6,1,05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100.000.000,00	0	0
<b>6,2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6,2,02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>13.792.447.501,91</b>	<b>13.692.447.501,91</b>	<b>99,27</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>37.331.205.972,34</b>	<b>0,00</b>

#### 4. Inovasi Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2017, inovasi daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Secara umum inovasi daerah juga dapat diartikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kinerjanya. Hal ini

perlu dilaksanakan karena sasaran dari inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan juga peningkatan daya saing daerah. Adapun bentuk dari inovasi daerah berupa inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi kebijakan publik, dan juga inovasi daerah lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam era global, pembangunan perlu lebih mengedepankan aspek pemanfaatan Iptek dan inovasi sebagai faktor pembentuk daya saing. Pertumbuhan pembangunan perlu digerakkan oleh strategi yang tidak saja semakin efisien, namun mengedepankan inovasi dengan mendayagunakan Iptekin. Hal tersebut senada dengan semangat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen IV) pada pasal 31 ayat 5 yang menyatakan bahwa “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

Sebagai pelaksana ketentuan tersebut, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memperkuat daya dukung Iptek dalam meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa menghadapi persaingan global. Kemudian sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa inovasi menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi menentukan tingginya daya saing suatu daerah/negara.

Untuk menjalankan prinsip-prinsip Inovasi Daerah tersebut, peran Organisasi Perangkat Daerah dibutuhkan guna menerapkan solusi-solusi kreativitas terhadap masalah dan peluang yang ada di suatu wilayah, mengenai bentuk inovasi daerah sebagaimana tercantum pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2017 antara lain sebagai berikut:

1. Inovasi tata Kelola pemerintah daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintah Daerah, yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen atau pengelolaan unsur manajemen.
2. Inovasi pelayanan publik, dan/atau merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik
3. Inovasi daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

Terkait dengan inovasi daerah ini untuk tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki beberapa inovasi daerah yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran

serta masyarakat, peningkatan daya saing Daerah. Banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah berpartisipasi dalam inovasi daerah ini sehingga diharapkan dapat semakin meningkatkan kinerja dan pelayanan daerah dalam berbagai lini sektor. Berikut disajikan berbagai inovasi daerah yang ada di Kabupaten Bangka Barat :

**Tabel 5.1**  
**Inovasi Daerah di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025**

<b>No</b>	<b>Pelaksana inovasi daerah</b>	<b>Judul inovasi daerah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bumdesa Corners Sekolah Ubok Sekicing	Digital
2	Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	SI GASING MELANTING (Siap Cegah Stunting Melalui Layanan Konseling)	Non Digital
3	Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	SI PENJAGA ANAK (SInergi PENcegahan, penJamin penanGANan kasus kekerasan ANAK)	Non Digital
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	LINGKARAN LITERASI INKLUSI SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN (LILIS SEJAHTERA)	Non Digital
5	Kecamatan Jebus	LAYANAN DIGITAL ADMINISTRASI PUBLIK DI KECAMATAN JEBUS (LADIMIN-JEBUS)	Digital
6	Kecamatan Kelapa	Sistem Layanan Berbasis Whatsapp (SAYA BISA)	Digital
7	Kecamatan Mentok	APATAR (Aplikasi Pertanahan Berbasis Digital)	Digital
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	SITUKANG INFO (Sistem Terpadu Kerjasama Penanganan dan Informasi Penegakan)	Digital
9	RSUD Sejiran Setason	INTAN RUBI (Integrasi Layanan Rujukan Bersama Sejiran)	Digital
10	Puskesmas Jebus	SEBUMI HANTING LINMAS (Senam Ibu Hamil dengan Metode Hypno Happy Birthing menjadi Persalinan Nyaman Aman tanpa Cemas)	Non Digital
11	Puskesmas Mentok	JBK (Jumat Berantas Jentik)	Non Digital
12	Puskesmas Puput	POS MANTAN (POS MALARIA DAN PENGOBATAN)	Non Digital



## **SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

*Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat  
Dusun Daya Baru, Desa Belo Laut, Pal 4, Mentok*